

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Masalah

Pada saat ini, Indonesia sedang mengupayakan perwujudan akuntabilitas yang merupakan salah satu unsur penting untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada pencapaian *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggungjawab, efisien serta efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>1</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan BPK RI merupakan satu-satunya lembaga audit eksternal yang independen sehingga memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut serta mewujudkan terciptanya akuntabilitas dan transparansi untuk tercapainya *good governance*. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri. Perwujudan kebebasan dan kemandirian BPK tercantum pada Undang-Undang BPK RI tentang Kode Etik. Kode etik tersebut mengatur mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan bagi para anggota dan pemeriksa BPK.

---

<sup>1</sup> Waluyo. (2009). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal.195

Guna menunjang keberhasilan penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsi BPK, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat Badiklat PKN BPK RI menyelenggarakan diklat prajabatan “Orientasi ke-BPK-an” yang didalamnya terdapat mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI.

Pelaksanaan mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI sudah ditunjang dengan fasilitas yang cukup memadai. Namun, dinilai masih memiliki beberapa kekurangan. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara tidak struktur pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 10.25 WIB kepada Bapak M Yusuf Jhon selaku Kepala Teknologi Pembelajaran Badiklat PKN BPK RI.<sup>2</sup> Hasil yang diperoleh bahwa dalam proses pelatihan mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI mengalami beberapa kendala diantaranya:

- 1) Waktu pelaksanaan mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI cukup terbatas yaitu hanya terdapat 4JP atau 1 kali pertemuan dengan menggunakan metode ceramah, sehingga sebaiknya diperlukan metode yang lebih baik.
- 2) Melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta diklat yang beragam, tetapi tidak adanya fasilitas untuk belajar mandiri (*self*

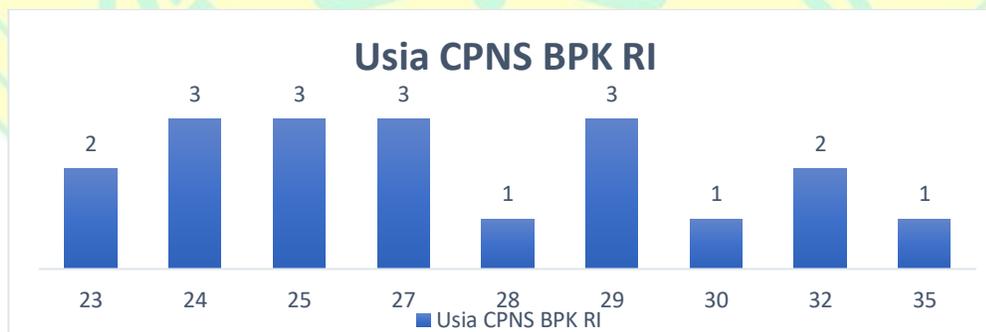
---

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur kepada Kepala Bagian Teknologi Pembelajaran Badiklat PKN BPK RI

*learning*) menyebabkan peserta diklat mengalami *lack of knowledge*. Pembelajaran yang berkualitas bukan hanya berbicara mengenai banyaknya materi pelajaran yang diberikan, tetapi diiringi pula dengan adanya fasilitas untuk belajar mandiri; dan

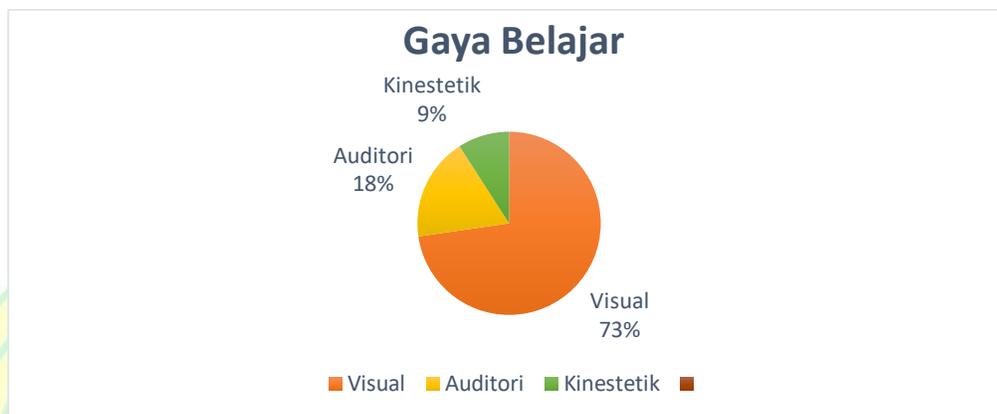
- 3) Bahan ajar yang disajikan kurang relevan, yaitu disajikan melalui *Ms. Powerpoint* (PPT). Sehingga, materi dalam PPT kurang meng-*guide* peserta diklat untuk mengeksplere lebih jauh mengenai materi kode etik dan disiplin BPK RI, dikarenakan minimnya referensi yang disajikan. Pada kondisi aktualnya dengan tampilan data yang terpercaya maka akan membantu peserta diklat dalam memahami materi pembelajaran.<sup>3</sup>

Selanjutnya pengembang melakukan survei secara *online* kepada CPNS Badiklat PKN BPK RI tahun 2021 sebanyak 22 responden pada tanggal 23 Februari 2022 melalui *google form*. Hasil survei yang didapatkan diketahui sebagai berikut.



<sup>3</sup> Ega Rima Wati, *Ragam Media Pembelajaran Visual, Audio Visual, Power Point, internet, Interactive Video*, (Kata Pena, 2016) h. 9.

Gambar 1. 1 Hasil Survei Rentang Usia Peserta Diklat



Gambar 1. 2 Hasil Survei Gaya Belajar Peserta Diklat

Berdasarkan data dari hasil survei yang telah dilakukan pengembang yang terdapat pada Gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa rentang usia peserta diklat yaitu mulai dari usia 23 sampai dengan 35 tahun. Elizabeth B. Hurlock (dalam Yusnimar, 2013:36) menjelaskan bahwa usia masa dewasa awal/dini berkisar antara usia 18 – 40 tahun.<sup>4</sup> Pendidikan orang dewasa merupakan suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup dan berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya.<sup>5</sup>

Selanjutnya pada Gambar 1.2 di atas, 72.5% CPNS BPK RI tahun 2021 mempunyai gaya belajar visual. Maka tantangan bagi pengelola

<sup>4</sup> Yusnimar Yusri, "Strategi Pembelajaran Andragogi", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.12 No. 1 (Januari-Juni, 2013), 36.

<sup>5</sup> Pannen, Paulina dan Ida, "Pendidikan Orang Dewasa", dalam Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Mengajar di Perguruan Tinggi Bagian Dua (1997), hlm. 4-6

pembelajaran di Badiklat PKN BPK RI adalah perlu melakukan analisis kebutuhan peserta diklat, agar terciptanya keseimbangan antara orientasi organisasi yang akan dituju dengan kinerja yang seharusnya dilakukan oleh pegawai dalam mewujudkan pengembangan organisasi yang optimal.

Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses sumber teknologi yang tepat dan sesuai. Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada diperlukan pengembangan sumber belajar yang bersifat *self directing* agar peserta diklat dapat lebih mudah dalam mempelajari dan memahami materi kode etik dan disiplin pegawai BPK RI. Modul dipilih karena merupakan sumber belajar yang dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik dan peserta diklat tidak lagi minim informasi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Pengembangan modul *hypercontent* diharapkan akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan tidak monoton. Hal tersebut dikarenakan dalam modul *hypercontent*, peserta diklat akan disediakan fitur *link* atau *QR Code* yang apabila terhubung dengan internet akan langsung dapat mengakses seperti *cloud computing*, *youtube*, dan lain sejenisnya. Pembelajaran *hypercontent* mempunyai

tujuan menghubungkan peserta diklat dengan berbagai sumber belajar secara lebih luas. Sehingga akan memberikan kemudahan bagi peserta diklat dalam menemukan sumber referensi yang dibutuhkan sesuai dengan ciri khas modul sebagai *self learning instruction*.

Pada jurnal yang ditulis oleh Jhoni Lagun Siang, Nurdin Ibrahim, dan Robinson Situmorang (2019) yang berjudul "*Development of Hypercontent Module Using Jonnuro Model Learning Design for Candidates Master Guide*" menjelaskan bahwa makna *hypercontent* diadopsi dari pola membaca digital yang bersifat nonlinear.<sup>6</sup> *Hypercontent* juga dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang menstimulasikan satu materi dan materi lainnya secara bersamaan.

Selanjutnya, pada jurnal yang ditulis oleh Nurfadhilah, Erry Utomo, Amos Neokala, dkk (2021) yang berjudul *Puberty Education in Primary School: Situation and Solution* mengungkapkan bahwa situasi pandemi covid-19 menyebabkan pendidikan pubertas masih dianggap sebagai materi yang sulit untuk disampaikan pada tingkat sekolah dasar karena materi tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga guru harus memiliki keterampilan pedagogik tentang pubertas. Pada penelitian ini,

---

<sup>6</sup> Jhoni Lagun Siang, Nurdin Ibrahim, dan Robinson Situmorang, "*Development of Hypercontent Module Using Jonnuro Model Learning Desain for Candidates Master Guide*", International Journal of Recent and Technology Engineering, Vol. 8 (September,2019),78.

guru difasilitasi modul *hypercontent* untuk mempertimbangkan bagaimana cara mengajar yang baik mengenai materi pubertas.<sup>7</sup>

Fokus intervensi peneliti yaitu mengembangkan modul *hypercontent* untuk mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI sebagai prototipe dalam pengembangan modul di Badiklat PKN BPK RI. Niat baik peneliti dalam mengembangkan modul *hypercontent* untuk mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI pun diterima dengan senang hati oleh pihak Badiklat PKN BPK RI.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian analisis masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa saja kompetensi yang dibutuhkan peserta diklat pada mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI?
2. Bagaimana cara agar peserta diklat mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI mendapatkan kompetensi yang diperlukan?
3. Apakah intervensi dengan mengembangkan modul *hypercontent* dapat dijadikan sebagai bahan ajar mandiri pada mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI?

---

<sup>7</sup> Nurfadhilah, Erry Utomo, Amos Neokala, "Puberty Education in Primary School: Situation and Solution", International Journal of Mechanical Engineering, Vol. 6 (January-June,2021).

4. Bagaimana mengembangkan modul *hypercontent* untuk memfasilitasi kegiatan diklat pada mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI?

### **C. Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan analisis masalah dan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan, maka peneliti memfokuskan pada masalah ketiga dengan ruang lingkup yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Jenis Masalah

Bagaimana pengembangan modul *hypercontent* untuk memfasilitasi CPNS BPK RI pada mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI.

2. Fokus Pembahasan

Mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI”.

3. Sasaran

Sasaran pengguna dikhususkan untuk CPNS BPK RI yang akan mengikuti mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI.

4. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Badiklat PKN BPK RI.

### **D. Tujuan Pengembangan**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan

produk bahan ajar berupa modul *hypercontent* untuk mata diklat kode etik dan disiplin pegawai BPK RI di Badiklat PKN BPK RI.

#### E. Kegunaan Hasil Penelitian

- **Praktis**

1. Badiklat PKN BPK RI

- a) Meningkatkan pemahaman belajar peserta diklat secara mandiri.
- b) Dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar.
- c) Meningkatkan minat peserta diklat dalam belajar.

2. Mahasiswa Teknologi Pendidikan

Sebagai pedoman dan evaluasi pelaksanaan penelitian berikutnya, agar dapat berlangsung dengan lebih baik dan mendalam.

3. Peneliti

- a) Sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
- b) Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan sumber belajar.

- **Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengembangan modul *hypercontent* untuk pelatihan dengan menggunakan model yang berorientasi pada produk.